

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Nama	: R I N A
NPM	: 2105170197
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIFA
N P M : 2405170197
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI-PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERDANG BEDAGAI

Dinyatakan : (A-) Lulus Tadrisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

Penguji II

(Edisah Putra Nainggolan, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Dian Yustriawan, S.E., M.Si)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RINA
N.P.M : 2105170197
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DESA DI KECAMATAN TEBING KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Agustus 2025

Pembimbing Tugas Akhir

DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : RINA
NPM : 2105170197
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Kabupaten Serdang Bedagai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pertanyaan fenomena pada latar belakang masalah - lampiran data selama lima tahun	17/01/25	1
Bab 2	- tambah teori tentang variabel penelitian	23/01/25	1
Bab 3	- Revisi jarak tujuan dan perbaikan narasi	17/02/25	1
Bab 4	- Penguatan teori & hasil penelitian	30/7/25	1
Bab 5	- Sinkronkan narasi di BAB 5 dengan hasil penelitian	5/8/25	1
Daftar Pustaka	- Rapih penulisan	2/8/25	1
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sidang Meja Hijau	6/8/25	1

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Medan, Agustus 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Dian Yustriawan, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : R I N A

N.P.M : 2105170197

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan
Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Desa Di Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Serdang Bedagai**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

**R I N A
2105170197**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Tebing, Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada 84 responden yang merupakan pegawai desa di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan sistem akuntansi yang sesuai dan pengawasan internal yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan hasil kinerja pemerintahan tingkat desa.

Kata Kunci : Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Internal, Akuntabilitas Kinerja Instansi

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

R I N A

2105170197

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

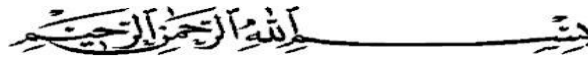
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

This study aims to examine the effect of the implementation of government accounting and internal control on the performance of village government agencies in Tebing Subdistrict, Serdang Bedagai Regency. The method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to 84 respondents who are village officials in the area. Data analysis was performed using multiple linear regression with SPSS software version 25. The results of the study indicate that the implementation of government accounting and internal control significantly and positively influences the performance of village government agencies. These findings emphasize the importance of implementing appropriate accounting systems and effective internal control in enhancing accountability and performance outcomes at the village government level.

Keywords: Government Accounting, Internal Control, Accountability, Agency Performance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kemuliaan Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan Tugas akhir ini sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tugas akhir ini disusun berdasarkan Panduan Tugas akhir Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda tercinta rojali buyung dan pintu surgaku Ibunda tersayang saidah yang terus mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, juga nasihat-nasihat yang bermakna dan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis
2. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah .
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si. CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nabila Dwi Aginta, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dian Yustiawan, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan pengarahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ibu Safrida Hanum, S.E., S.S., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan arahan selama perkuliahan.

Akhir kata, harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi laporan agar menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Medan, Agustus 2025

Penulis

RINA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan.....	13
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan	14
2.1.3 Pengawasan Internal.....	16
2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	30

3.2	Definisi Operasional	30
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1.	Detugas akhir Karakteristik Responden	41
4.1.2.	Detugas akhir Variabel Penelitian.....	42
4.1.3.	Uji Kualitas Data	51
4.1.4.	Hasil Uji Reliabilitas.....	54
4.1.5.	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.1.6.	Hasil Uji Multikolineartitas	56
4.1.7.	Hasil Uji Hetersokedasitas.....	56
4.1.8.	Hasil Regresi Linier Berganda.....	57
4.1.9.	Hasil Uji Hipotesis.....	58
4.2	Pembahasan	62

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 - 2023.....	5
Tabel 1.2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tahu 2021 – 2025.....	9
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 3.4	Data Pegawai Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi.....	34
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	41
Tabel 4.3	Repsonden Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.4	Penilaian Responden Terhadap Variabel Akuntansi Pemerintahan (X1)	43
Tabel 4.5	Penilaian Responen Terhadap Variabel Pengawasan Internal (X2)	45
Tabel 4.6	Penilaian Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	48
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Akuntansi Pemerintahan (X1).....	51
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Pengawasan Internal (X2).....	52
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Kinerja Instansi Pemerintah (X3)	53
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas Akuntansi Pemerintahan (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	54
Tabel 4.11	Hasil Uji Kormogrov-Smirnov	55
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolienaritas	56
Tabel 4.13	Hasil Regresi Linier Berganda	57
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	59
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultas (Uji F)	60
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	54
Gambar 4.2 PP-Plot Uji Normalitas	55
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> Uji Hetersokedasitas	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelola dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara seperti Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2019). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan akuntansi pada sektor publik sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Peranan sektor publik ini memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Haryanto (2020) menyatakan jika diamati secara lebih dalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akuntansi. Pada pembahasan sektor publik dianggap kurang efisien dikarenakan praktik manajemen yang perlu dilakukan perbaikan seperti akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, pembangunan dan sistem pemeriksaan serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah agar bisa mendapat kualitas yang baik bagi masyarakat.

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020

Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut : Bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks Kinerja Instansi Pemerintah daerah.

- b) Bahwa Mentri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten / kota.
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Mentri Dalam Negeri tentang pengukuran indeks Kinerja Instansi Pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo dalam artikel Hafsah Siregar (2017) bahwa Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga dalam artikel yang dituliskan oleh Heri Susanto, dkk (2021) bahwa Kinerja Instansi Pemerintah daerah yang baik harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana Kinerja Instansi Pemerintah daerah yang baik adalah kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Penerapan akuntabilitas pada sektor publik sangat penting guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hasil kerja suatu instansi pemerintah adalah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat dilihat melalui informasi tentang sistem pertanggungjawaban kinerja masing-masing instansi pemerintah. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan sebagai dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga

diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagai penyelenggara pemerintah pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP berdasarkan peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintahan pusat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kebijakan strategis di Indonesia saat ini, karena peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berdampak pada upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi.

Menurut Mulyadi dalam penelitian Novien Rialdy, dkk (2020) Manajemen perusahaan dan pemerintah membutuhkan jasa pengawasan eksternal sehingga penyajian akuntabilitas keuangan kepada pihak luar dapat dipercaya, sementara pihak luar membutuhkan layanan pihak ketiga untuk mendapatkan keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan bisa dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Hasil kualitas audit adalah sesuatu yang harus auditor capai dalam setiap proses audit. Hasil kualitas audit dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan seperti yang akan terjadi dapat diandalkan oleh pengguna sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Pada saat sekarang ini pentingnya akuntabilitas semakin diperlukan seiring dengan proses globalisasi yang menuntut pemerintahan yang baik (*good*

governance) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam peningkatan kinerja serta pelayanan publik. Seiring meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap sektor pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah kepada masyarakat harus semakin memuaskan (*service excellence*). Menurut Agoes dalam artikel M.Firja Alpi dan Puja Rizky Ramadhan (2018) yang menyatakan bahwa suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Untuk menghadapi keadaan tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang memperkuat efektivitas pertanggung jawaban kinerja atas wewenang yang mempengaruhi akuntabilitas secara efisien dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Serta yang harus dilakukan adalah meningkatkan sikap profesionalisme agar memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki prinsip dalam memberikan pelayanan yang sesuai tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Dari segi aspek pemerintahan dapat ditinjau apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam mewujudkan tujuan dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/168/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 , Pemerintah Desa

Kabupaten Serdang Bedagai mendapat nilai 67,85 dengan rincian penilaian seperti pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi AKIP	64,32	65,21	65,52	65,85	67,85
Kategori Predikat	B	B	B	B	B

Sumber : Pemerintah Serdang Bedagai, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 di atas hasil evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 67,85 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Secara umum, hasil evaluasi tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya, namun tidak diperbandingkan dengan sebelumnya karena berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainya. Evaluasi tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi AKIP baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.

Dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 Nomor : B/168/AA.05/2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal agar Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai lebih baik dan lebih meningkatkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya, sesuai dengan mandat organisasinya dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan, dan menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen pohon kinerja (*cascading*) baik di level Pemerintah Daerah untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya sebagai dasar penetapan kinerja setiap level jabatan;
- 4) Melakukan reviu kinerja individu dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja setiap individu dapat menunjang kinerja organisasi;

- 5) Menyelaraskan perencanaan kinerja, serta memastikan keandalan dan validitas pengukuran seluruh kinerja utama perangkat daerah dengan melengkapi definisi operasional/formulasi perhitungannya;
- 6) Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi manajemen kinerja dan mendorong seluruh pegawai menggunakan aplikasi tersebut untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time;
- 7) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 8) Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level pemerintah daerah dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- 9) Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
- 10) Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi mana;
- 11) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda dengan menyajikan updated data kinerja yang lengkap, analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi beserta

solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- 12) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP masing-masing perangkat daerah, sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 13) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 14) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki beberapa kecamatan salah satunya adalah kecamatan Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi memiliki Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat indikatif. Salah satu Rencana Strategis (Renstra) yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan. Berikut Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi periode tahun 2021 – 2025.

Tabel 1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Evaluasi AKIP	85	85,5	86	86,6	87
Kategori Predikat	B	B	B	B	B

Sumber : Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2025

Pengawasan internal pada Pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Serdang Bedagai dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Serdang Bedagai. Menurut Sari dalam penelitian Arfah Lubis, dkk (2020) menjelaskan bahwa “konsep *good governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah”. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Oleh karena itu, pemerintah daerah/desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

- 1) Konsep akuntabilitas pemerintahan belum mampu diterapkan secara konsisten hal ini disebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Masih terdapat kelemahan dan ketidakmampuan pihak pengendalian internal dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya.
- 3) Laporan keuangan berbasis standar akuntansi sebagai aspek peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan yang terbentuk dari ketidakmampuan pihak pengawasan internal.

1.3 Batasan Masalah.

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Informasi yang disajikan yaitu: Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Internal, dan hubungannya terhadap Kinerja Instansi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah penerapan akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai?

- 2) Apakah pengawasan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Serdang Bedagai?
- 3) Apakah penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan serta pengawasan internal secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mendapatkan ilmu, informasi serta pemahaman mengenai pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan

dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Bagi Instansi

Pemerintah Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
Penelitian ini digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak pihak yang membutuhkan dan juga dapat dijadikan sebagai landasan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

3) Bagi Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dala melakukan penelitian mengenai pengaruh dari penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan

Menurut Ismalim et al (2016) dalam artikel Naufal, dkk (2023) *Agency Theory* adalah penjelasan hubungan kontraktual antara agent dan principal. Pihak agent merupakan pihak yang mendapatkan amanat dari pihak principal untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama principals, dalam hal ini agent memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan. *Agency Theory* timbul akibat terdapatnya kontrak kerja atas kesepakatan yang dilakukan oleh agent dan principal.

Mengenai masalah keagenan, praktik pelaporan keuangan organisasi sektor publik didasarkan pada konsep teori keagenan. Pada laporan keuangan sektor publik, pemerintah bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang berguna terhadap keuangan pemerintah, bertanggung jawab untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial atau politik. Suatu tata kelola yang demokratis, hubungan antara pemerintah dapat dibidang sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah dimana Camat sebagai pimpinan di Kantor Kecamatan Tebing TinggiSerdang Bedagai bertindak sebagai *principal* (Pengelola Pemerintahan) yang kemudian menetapkan dan menyusun strategi khusus agar strategi yang telah disusun dapat

dijalankan dengan baik oleh pegawai Kantor Kecamatan Tebing TinggiSerdang Bedagai yang memiliki peran sebagai agen.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Halim dalam penelitian Muhammad Syahputra Rizki dan Novien Rialdy (2023), akuntansi pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara. Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bisa atau dapat diringkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU serta Peraturan lain. Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian dirancang untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU serta Peraturan lain.
- b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut harus dikembangkan sesuai yakni dengan klasifikasi anggaran yang telah atau sudah disetujui pemerintah serta lembaga legeslatif.
- c. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk dapat mencatat transaksi-transaksi yang terjadi
- d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan tersebut kemudian harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

- e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan serta juga sifat transaksi, sistem Akuntansi Pemerintah tersebut harus terus disesuaikan serta juga dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan juga relevansi.
- f. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan dengan secara efektif sehubungan yakni dengan sifat serta perubahan lingkungan sehingga kemudian bisa atau dapat mengungkapkan hasil ekonomi serta keuangan dari pelaksanaan di suatu program. Pengadaan suatu Perkiraan yang kemudian dibuat tersebut harus memungkinkan adanya analisis ekonomi atas data keuangan.

Sedangkan menurut Sujarweni (2022) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Halim dan Kusufi (2019) menyebutkan ada tiga tujuan akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.3 Pengawasan Internal

1. Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan dapat juga diartikan sebagai bentuk proses untuk menjamin segala tujuan-tujuan manajemen dan organisasi dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini memperlihatkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan juga pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa: pengawasan intern adalah semua proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Sonia dalam penelitian Fachrur Rozi, dkk (2021) menjelaskan bahwa Pengawasan internal sangat penting dalam menciptakan perkembangan organisasi dengan fungsi pengawasan atas risiko organisasi. Pengawasan internal merupakan penilaian yang dibentuk dalam organisasi yang melaksanakan kegiatannya untuk organisasi tersebut. Pengawasan internal juga membantu anggota organisasi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan menyediakan mereka berbagai penilaian, nasihat, analisis, rekomendasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa. Pengawasan ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- 1) Memastikan (menentukan, memverifikasi)
- 2) Menilai (mengevaluasi, menaksir) dan
- 3) Merekomendasi (memberi saran).

Dengan tiga hal diatas, pengawasan ini tidak mencari kesalahan, hanya untuk meluruskan pelaksanaan aktivitas agar tercapai rencana yang sudah ditetapkan mampu berjalan dengan optimal. Ada beberapa hal agar sistem pengawasan dapat berjalan dengan efektif atau tidak yaitu dengan pemisahan tugas, sistem wewenang dan prosedur yang baik, praktik yang sehat, pegawai yang cakap, dan komitmen seorang pemimpin terhadap pengawasan tersebut.

2. Unsur – Unsur Pengawasan Internal

Dalam artikel Zulia Hanum (2009) menuliskan bahwa Pengawasan intern merupakan suatu bentuk pengawasan yang fungsinya mengukur dan menilai hasil yang di capai. Menurut IAI dan KAP (SPA 2001, SA Seksi 319) yang mengemukakan lima unsur pengendalian intern:

- 1) Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, lingkungan pengendalian intern, penyediaan disiplin dan struktur.
- 2) Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana harus dikelola.
- 3) Pengendalian adalah kebijakan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- 4) Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian. Penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- 5) Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

3. Manfaat Pengawasan Internal

Pengawasan internal dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang menguntungkan dan mencegah dari kehilangan sumber daya. Dapat juga membantu menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya. Digunakan juga untuk memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan organisasi untuk mencapai targetnya dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan

4. Indikator Keberhasilan Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh pemimpin dari seluruh pekerjaan karyawan sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan (Ristyowati et al., 2020). Menurut Arens, et al dalam penelitian Eka Nurmala Sari (2016) Secara umum sistem pengendalian intern memiliki lima komponen yaitu:

- 1) lingkungan pengendalian,
- 2) penilaian risiko,
- 3) aktivitas pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi, dan
- 5) pemantauan.

Adapun Indikator pengawasan kerja menurut Handoko (2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Akurat Informasi yaitu tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang tidak ada atau baru.
- 2) Tepat waktu yakni Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan.
- 3) Obyektif dan menyeluruh yakni informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
- 4) Terpusat pada titik-titik pengawasan dimana strategi Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana

penyimpangan penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling fatal.

- 5) Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- 6) Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan kenyataan yang ada pada organisasi.
- 7) Koordinasi dengan aliran kerja organisasi yakni informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan.
- 8) Fleksibel yakni pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
- 9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional sistem pengawasan harus efektif, harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standart, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
- 10) Diterima para anggota organisasi. Dimana sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota atau karyawan organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Banyak pendapat para ahli terkait dengan kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi definisi, pengukuran, indikator, dan evaluasi kinerja. Setelah suatu sistem Kinerja Instansi Pemerintah terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik serta ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan

manajemen kinerja yang terdapat di dalam indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja dan mekanisme *reward and punishment*. Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, *unambiguous*, *cost-effective* dan *simple* serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono, 2018).

2. Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan ataupun kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dapat dikatakan sebagai suatu bentuk evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, berdasarkan tolak ukur yang dibuat sesuai standar minimum pelayanan publik.

Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih terhadap kinerja Kinerja Instansi Pemerintah daerah. Kinerja Instansi Pemerintah daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian dari suatu daerah. Dengan begitu, suatu daerah yang kinerja keuangannya telah dinyatakan baik berarti daerah tersebut telah memiliki kemampuan keuangan untuk dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan peningkatan akuntabilitas. Kinerja pemerintah daerah merupakan keseluruhan dari capaian atau hasil-hasil selama pelaksanaan otonom daerah. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah daerah.

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu

Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada.

2) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas

Untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka.

3. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kinerja sendiri merupakan acuan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian dari tujuan yang telah diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang telah ditetapkan (Mahsun 2016).

Bastian (2019) menjelaskan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dari

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikatornya. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja merupakan proses penetapan indikator – indikator dan target kinerja dalam mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk kemudian dievaluasi. Kinerja diukur untuk dilihat pencapaian dari tujuan dan sasaran dari program yang telah dirumuskan di dalam dokumen perencanaan strategis.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Perbedaan
1	Mutiara Nadzilla Mirza (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Medan Selayang	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, dan pendekatan asosiatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Camat Medan Selayang sementara penelitian ini dilakukan di Kantor Desa yang notaben populasinya lebih sedikit.
2	Reza Zaki Mubarok, dkk (2021)	Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik regresi berganda dan uji	Perbedaan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asumsi klasik sementara

		Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes	asumsi klasik sebagai metode analisis utama	penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif
3	Muhammad Egi Akabr Sudarto, et al (2024)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Analisis statistik dilakukan dengan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu penerapan akuntansi sektor publik (X1) dan pengawasan internal (X2), terhadap variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah daerah (Y)	Perbedaan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asumsi klasik sementara penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif
4	Dea Juliani,	Pengaruh	Metode analisis	Perbedaan

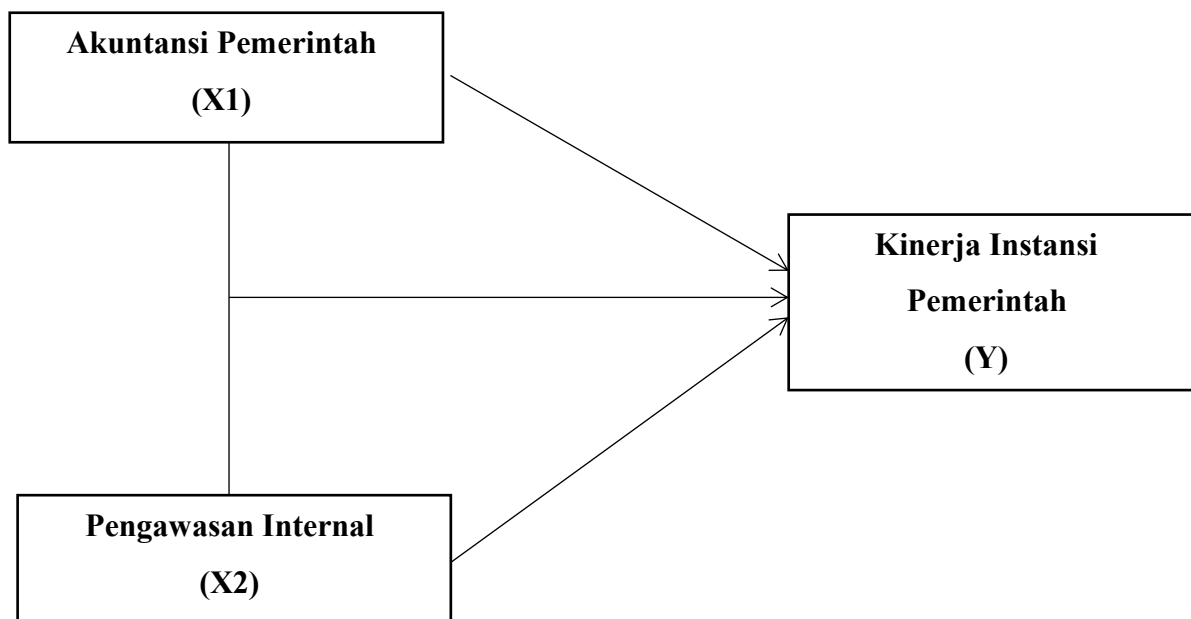
	dkk (2024)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket kuesioner. Metode pengelolaan data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 29.	penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asumsi klasik sementara penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif
5	Irpan Tandibua, dkk (2024)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis linier sederhana. Data diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan kuesioner yang dibagikan kepada 24 responden dari Organisasi	Perbedaan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asumsi klasik sementara penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif

			Perangkat Daerah (OPD)	
--	--	--	---------------------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kumpulan konsep dari fenomena yang diteliti sehingga maknanya masih sangat abstrak dan dapat dimaknai secara subjektif dan dapat pula menimbulkan arti yang ambigu (Suliyanto, 2018). Kerangka konseptual ini memberikan tentang bagaimana secara teoritis hubungan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis (2025)

2.4 Hipotesis

Keterangan Sugiyono (2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah pada penelitian, dimana masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pernyataan. Dapat dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, masih belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Bisa dibilang hipotesis biasa dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka peneliti menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H1: Penerapan Akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Tebing TinggiSerdang Bedagai.
- H2: Pengawasan Internal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Tebing TinggiSerdang Bedagai.
- H3: Penerapan Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Internal berpengaruh secara simultan terhadap upaya Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Tebing TinggiSerdang Bedagai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Guna mengukur seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi pemerintah dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah, tentu diperlukan informasi dari responden peneliti, sehingga dari itu jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Adapun pengertian assosiatif menurut Sugiyono (2020) ialah sesuatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan ikatan antara dua variabel ataupun lebih.

Adapun variabel yang dihubungkan dalam menyusun penelitian ini yaitu Akuntansi Pemerintah (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai analisis data penelitian. Analisis sesuatu data ialah salah satu bagian dari proses penelitian, Manullang & Pakpahan (2019) berpendapat terkait analisis data kuantitatif ialah analisis data pada data-data terdapat angka-angka tertentu. Analisis data kuantitatif memakai statistik yang beragam.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional ialah petunjuk bagaimana sesuatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Variabel penelitian merupakan segala suatu yang bisa dijadikan objek penelitian ataupun faktor- faktor yang berfungsi dalam kejadian ataupun gejala yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Adapun definisi operasional dari tiap- tiap variabel dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut. Berikut indikator dirangkum dalam tabel dan disertakan variabel, indikator, sub indikator serta skala pengukuran.

Tabel. 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Akuntansi Pemerintah (X1)	Mekanisme teknis dan analisis akuntansi melaksanakan pengelolaan dana publik di lembaga dan dapertemen tingkat tinggi negara, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, LSM, dan yayasan sosial, dan proyek kerja sama dapertemen publik dan swasta (Bastian, 2014).	1. Analisis bukti transaksi 2. Pencatatan data transaksi 3. Pengikhtisaran 4. Pelaporan	Interval
Pengawasan Internal (X2)	Pengawas mencakup rencana organisasi dan semua metode yang terkordinasi dan berlaku untuk prusahaan yang mengamankan aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, optimis dan mendorong ketaatan kebijakan manajemen yang dikembangkan (Swayer, 2010)	1. Organisasi 2. Kebijakan 3. Prosedur 4. Penganggaran	Interval

Akuntabilitas Kinerja Intansi (Y)	Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masingmasing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono 2010).	1. Ekonomis (Cermat dalam penggunaan dan alokasi sumber daya) 2. Efisiensi (Penggunaan sumber daya) 3. Efektivitas (Pencapaian tujuan)	Interval
-----------------------------------	--	--	----------

Sumber : Penulis 2025

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian . Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tebing TinggiKabupaten Serdang Bedagai.

3.3.2 Waktu Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan mulai Februari 2025 sampai dengan selesai, berikut jadwal proses penelitian:

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

N o	Aktivitas	Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agust 2025			
1	Penelitian Pendahuluan (Prariset)																												
2	Penyusunan Tugas akhir																												
3	Pembimbingan Tugas akhir																												
4	Seminar Tugas akhir																												
5	Penyempurnaan Tugas akhir																												
6	Analisis Pengolahan Data																												
7	Bimbingan Tugas akhir																												
8	Sidang Meja Hijau																												

Sumber : Penulis 2025

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk teknik pengambilan sampling dalam penelitian kali ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *Purposive Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, saat ini peneliti menggunakan suatu metode berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti kali ini dengan objektif. Sampel pada penelitian ini, yaitu pegawai kantor Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 84 orang . Menurut Sugiyono (2019) Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan, yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk penelitian. Berikut rincian sampel penelitian :

Tabel 3.4 Data Pegawai Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi

No	Nama Desa	Jumlah Pegawai
1	Bah Sumbu	6 orang
2	Gunung Kataran	6 orang
3	Jambu	6 orang
4	Kedai Damar	6 orang
5	Kuta Baru	6 orang
6	Mariah Padang	6 orang
7	Naga Kesiangan	6 orang
8	Paya Bagus	6 orang
9	Paya Lombang	6 orang
10	Paya Mabar	6 orang
11	Penonggol	6 orang
12	Pertapaan	6 orang
13	Sei Priok	6 orang
14	Sei Serimah	6 orang

Sumber : Arsip Kecamatan Tebing Tinggi Serdang Bedagai (2025)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta menurut penelitian Juliandi et al., (2018). Pengumpulan data bisa dicoba dalam sebagian metode seperti experiment survei, ataupun pengamatan lapangan. Dalam buku Metode Penelitian Survei oleh Morissan (2020), dijabarkan bahwa penelitian kuantitatif mempunyai

sebagian metode pengumpulan data seperti survei yang mencakup survei lewat telepon, survei internet. Pada metode ini, persoalan yang diajukan bersifat tetap (statis), ataupun telah terstandar

Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data survei, setelah itu pengumpulan data yang dipakai adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2019) Kuesioner ialah metode pengumpulan data dimana karyawan mengisi pernyataan ataupun pertanyaan kemudian sesudah diisi lengkap mengembalikan kepada peneliti.

Menurut Arikunto (2019) pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner memiliki keuntungan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti
- b. Dapat diberikan secara serentak kepada banyak responden
- c. Responden menjawab sesuai dengan kecepatannya masing-masing
- d. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu dalam menjawab
- e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Selain adanya beberapa keuntungan yang didapat dari kuesioner (angket) tersebut, sisi lain dari kuesioner (angket) ini juga tidak terlepas dari kekurangan ataupun kelemahan, berikut kelemahan dari metode kuesione yaitu :

- a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga dikhawatirkan ada pertanyaan yang terlewat dan tidak dijawab.
- b. Sering kali sulit dicari validitasnya
- c. Waktu pengembalianya tidak bersamaan

- d. Sering tidak kembali terutama jika menggunakan kuesioner yang dikirim dan diberikan bukan secara langsung
- e. Walaupun dibuat anonim dimungkinkan terkadang ada responden yang memberikan jawaban tidak jujur.

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuisisioner melalui dunia maya/internet, sebab kebanyakan responden penelitian berada jauh ataupun berasal dari dunia maya/internet, yaitu dengan penggunaan *google form*.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Manullang & Pakpahan (2019), uji validitas digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah ataupun valid tidaknya suatu kuesioner, dimana suatu kuesioner dikatakan valid bila pernyataan pada kuesioner sanggup untuk mengungkap sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan syarat ialah nilai *corrected item total correlation* $> 0,30$ maka data dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas (Kehandalan)

Menurut Manullang & Pakpahan (2019) Uji reliabilitas ialah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dengan ketentuan yaitu nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ maka data dinyatakan handal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi datanya terdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik jika distribusi datanya mengikuti distribusi normal atau mendekati normal, caranya adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan biasanya berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov *Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dikatakan distribusi data tidak normal.

Selain itu, metode lain yang dapat digunakan untuk melihat normalitas residual dengan normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui terdapat tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain

dalam suatu model regresi, ataupun untuk mengetahui terdapat tidaknya korelasi diantara sesama variabel indepeden. Uji Multikolinearitas dicoba dengan membandingkan nilai toleransi (*tolerance value*) serta nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan nilai yang disyaratkan. Nilai yang disyaratkan untuk nilai toleransi ialah lebih besar dari 0,01 serta untuk nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heterokedastistas

Uji ini dipakai bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi terjalin ketidaksamaan varians dari residul pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Bila varians berbeda, maka disebut heterokedastistas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Dalam pengamatan ini untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji Harvey. Uji Harvey adalah meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $p \text{ value} \geq 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai $p \text{ value} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas

3. Regresi Linear Berganda

Berdasarkan penelitian yang penulis buat, untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu melihat Pengaruh penerapan akuntansi pemerintah dan pengawasan internal terhadap kinerja

instansi pemerintah. Persamaan matematis analisis regresi linear berganda dituliskan dalam model persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja Instansi Pemerintah (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

β_2 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

β_3 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Akuntansi pemerintahan (*Independent Variabel*)

X_2 = Pengawasan Internal (*Independent Variabel*)

Y = Kinerja Instansi Pemerintah (*Dependent Variabel*)

e = *Error term*

4. Uji Hipotesis

Uji ini ialah persamaan regresi yang digunakan dalam proses perhitungan tidak senantiasa baik buat mengestiasi variabel dependen terhadap variabel independen. Hipotesis yang hendak diajukan hendak di uji signifikansinya. Pengujian akan dicoba dengan uji statistik berikut ini:

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial (uji T) menunjukkan seberapa jauh pengaruh setiap variabel bebas secara persial terhadap variabel terikat. Untuk pengujian hipotesis Asosiatif (hubungan) digunakan rumus uji signifikasi kolerasi produk moment.

b. Uji F

Pengujian ini dicoba dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan bisa mempengaruhi terhadap variabel dependen. Hipotesis untuk pengujian secara serempak adalah:

$H_0: \beta_1 = 0$, Artinya tidak terdapat Pengaruh penerapan akuntansi pemerintah

dan pengawasan internal secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Ha: $\beta_1 \neq 0$, Artinya terdapat Pengaruh penerapan akuntansi pemerintah dan pengawasan internal secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah..

Metode yang digunakan merupakan dengan menyamakan nilai F hitung dengan F table dengan syarat sebagai berikut :

Apabila:

$p > 0,05$ = Ha ditolak H0 diterima

$P < 0,05$ = Ha diterima atau H0 ditolak, Atau:

Kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima H0 (Tolak Ha) apabila F-hitung $<$ F-tabel, atau Sig F $>$ 0,05

Terima Ha (Tolak H0) apabila F-hitung $>$ F-tabel, atau Sig F $<$ 0,05

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Adjusted Squared (R²) adalah koefisien determinasi yaitu koefisien yang menjelaskan seberapa besar proporsi variasi dalam dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara bersama-sama.

Nilai R² koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Nilai R² sama dengan nol ($R^2 = 0$) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R² semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel dan bila R² semakin kecil mendekati 0 menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Detugas akhir Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki laki	34	40.4	40.4	40.4
	Perempuan	50	59.6	59.6	59.6
	Total	84	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa di Kecamatan Tebing yang menjadi responden berdasarkan Jenis Kelamin adalah berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 50 orang atau sebesar 59.6% dari total responden.

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5 - 10 Tahun	64	76.2	76.2	76.2
	11 - 25 Tahun	14	16.6	16.6	92.7
	<25 Tahun	6	7.2	7.2	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS versi 25

-

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa pada Kecamatan Tebing yang menjadi responden berdasarkan masa kerja adalah 5 – 10 thn yaitu sebanyak 64 orang atau sebesar 76.2 % dari total responden.

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMU/SMK	28	33.3	33.3	33.3
DIPLOMA	12	14.3	14.3	47.6
SERJANA	42	50	50	97.6
PASCA SERJANA	2	2.4	2.4	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS versi 25

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa pada Kecamatan Tebing yang menjadi responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah Sarjana, yaitu sebanyak 42 orang atau sebesar 50 % dari total responden.

4.1.10. Detugas akhir Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini responden memberikan jawaban-jawaban atas kuesioner sebanyak 24 pernyataan yang diberikan penulis terkait dengan judul penelitian. Dengan penyebaran angket dari butir-butir pertanyaan yang diberikan berdasarkan variabel harus diisi oleh responden berjumlah 84 responden dimana responden yang menjawab kuesioner ini adalah para Pegawai Intansi Desa pada

Kecamatan Tebing Kabupaten Serdang Bedagai. Disediakan jawaban angket dalam 5 alternatif jawaban yaitu:

- a. Sangat Setuju dengan skor 5
- b. Setuju dengan skor 4
- c. Tidak Setuju dengan skor 3
- d. Sangat Tidak Setuju dengan skor 2

Dengan jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat didetugas akhirkan sebagai berikut:

a. Variabel Akuntansi Pemerintahan (X1)

Tabel 4.4
Penilaian Responden Terhadap Variabel Akuntansi Pemerintahan (X1)

No Pernyataan	SS		S		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1.1	47	56.0	36	42.9	1	1.2	0	0	84	100
X1.2	38	45.2	25	29.8	21	25.0	0	0	84	100
X1.3	36	42.9	43	51.2	5	6.0	0	0	84	100
X1.4	50	59.5	25	29.8	9	10.7	0	0	84	100
X1.5	53	63.1	26	31.0	5	6.0	0	0	84	100
XI.6	41	48.8	35	41.7	8	9.5	0	0	84	100
X1.7	31	36.9	44	52.4	9	10.7	0	0	84	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS versi 25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai, Penyusunan dan penyajian LAK sesuai dengan SAP yang menjawab sangat setuju sebanyak 47 orang (56.0%), setuju sebanyak 36 orang (42.9%), dan tidak setuju sebanyak 1 orang (1.2%). Dengan hasil diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 47 orang atau 56.0% Pegawai Desa di Kecamatan Tebing sangat setuju dalam Penyusunan dan penyajian LAK sesuai dengan SAP

- 2) Jawaban responden mengenai, Penyajian informasi secara lengkap tentang penjelasan akun - akun dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan, yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 orang (45.2%), setuju sebanyak 25 orang (29.8 %), tidak setuju sebanyak 21 orang (25.0 %). Dari hasil yang diperoleh sebanyak 38 orang atau 45.2% sangat setuju bahwa pegawai desa di Kecamatan Tebing memahami penyajian informasi secara lengkap tentang penjelasan akun - akun dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan
- 3) Jawaban responden mengenai, Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami sesuai standar SAP yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 orang (42.9 %), setuju sebanyak 43 orang (51.2%), dan tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0 %). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di Kecamatan Tebing menjawab setuju sebanyak 43 orang atau 51,2% bahwa pelaporan informasi keuangan dapat dipahami sesuai standar SAP
- 4) Jawaban responden mengenai, mencatat/menilai asset tetap sebesar biaya perolehannya yang menjawab sangat setuju sebanyak 50 orang (59,5%), setuju sebanyak 25 orang (28,8 %), dan tidak setuju sebanyak 9 orang (10,7%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di Kecamatan Tebing menjawab sangat setuju sebanyak 50 orang atau 59,5% bahwa mencatat/menilai asset tetap sebesar biaya perolehannya.
- 5) Jawaban responden mengenai, mengklasifikasikan asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas., yang menjawab sangat setuju sebanyak 53 orang (63,1 %), setuju sebanyak 26 orang (31,0 %), dan tidak setuju sebanyak 5 orang (6.0%). Dari hasil yang diperoleh bahwa

pegawai desa di Kecamatan Tebing sangat setuju bahwa penerapan Akuntansi Pemerintahan di Kecamatan Tebing sesuai dengan klasifikasi asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.

6) Jawaban responden mengenai, Laporan posisi keuangan termasuk LRA,SAL,LO,LAK,LPE,dan CaLK, telah disusun dengan baik, yang menjawab sangat setuju sebanyak 41 orang (48,8 %), setuju sebanyak 35 orang (41,7 %), dan tidak setuju sebanyak 8 orang (9,5%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di Kecamatan Tebing sangat setuju bahwa Laporan posisi keuangan termasuk LRA,SAL,LO,LAK,LPE,dan CaLK, telah disusun dengan baik.

7) Jawaban responden mengenai, Informasi yang dihasilkan dampak laporan keuangan dapat menunjukkan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 orang (36,9 %), setuju sebanyak 44 orang (52,4 %), dan tidak setuju sebanyak 9 orang (10,7%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di Kecamatan Tebing sangat setuju bahwa penerapan Akuntansi Pemerintahan di Kecamatan Tebing selalu mendapatkan Informasi yang dihasilkan dampak laporan keuangan dapat menunjukkan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan.

b. Variabel Pengawasan Internal (X2)

Tabel 4.5
Penilaian Responden Terhadap Variabel Pengawasan Internal (X2)

No Pernyataan	SS		S		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X2.1	58	69.0	21	25.0	5	6.0	0	0.0	84	100

X2.2	45	53.6	34	40.5	5	6.0	0	0.0	84	100
X2.3	30	35.7	47	56.0	7	8.3	0	0.0	84	100
X2.4	34	40.5	22	26.2	22	26.2	6	7.1	84	100
X2.5	28	33.3	48	57.1	4	4.8	4	4.8	84	100
X2.6	48	57.1	31	36.9	5	6.0	0	0.0	84	100
X2.7	35	41.7	22	26.2	7	8.3	20	23.8	84	100
X2.8	45	53.6	32	38.1	3	3.6	4	4.8	84	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai, Terdapat struktur organisasi yang jelas ,yang menjawab sangat setuju sebanyak 58 orang (69,0%), setuju sebanyak 21 orang (25,0%), tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0%) Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di Kecamatan Tebing sangat setuju adanya struktur organisasi yang jelas mengenai pengawasan internal.
- 2) Jawaban responden mengenai, adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab., yang menjawab sangat setuju sebanyak 45 orang (53,6%), setuju sebanyak 34 orang (40,5%) tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di kecamatan tebing sangat setuju dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan internal yang berjalan.
- 3) Jawaban responden mengenai, prosedur kebijakan kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai sudah ditetapkan dengan jelas, yang menjawab sangat setuju sebanyak 30 orang (35,7%), setuju sebanyak 47 orang (56,0%), tidak setuju sebanyak 7 orang (8,3%). Dari hasil yang diperoleh, pegawai desa di kecamatan tebing setuju

dengan prosedur kebijakan kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai sudah ditetapkan dengan jelas.

- 4) Jawaban responden mengenai, terdapat sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap peraturan – peraturan yang ada, yang menjawab sangat setuju sebanyak 34 orang (40,5%), setuju sebanyak 22 orang (26,2%), tidak setuju sebanyak 22 orang (26,2%), sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (7,1%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di kecamatan tebing sangat setuju terdapat sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap peraturan – peraturan yang ada, tetapi sebagian responden menjawab tidak setuju yaitu sebanyak 22 orang atau 26,2%.
- 5) Jawaban responden mengenai, terdapat Terdapat alur (flow chart) yang jelas untuk masing-masing jenis pekerjaan, yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 orang (33,3%), setuju sebanyak 48 orang (57,1%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4,8%), sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (4,8%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di kecamatan tebing setuju bahwa alur (flow chart) yang jelas untuk masing-masing jenis pekerjaan.
- 6) Jawaban responden mengenai, menggunakan prosedur analitis dalam perencanaan dan review audit, yang menjawab sangat setuju sebanyak 48 orang (57,1%), setuju sebanyak 31 orang (36,9%), tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di kecamatan tebing sangat setuju bahwa menggunakan prosedur analitis dalam perencanaan dan review audit itu baik.
- 7) Jawaban responden mengenai, kebijakan penentuan tindak lanjut terhadap observasi SPI (Satuan Pengawas Internal)., yang menjawab sangat setuju

sebanyak 35 orang (41,7%), setuju sebanyak 22 orang (26,2%), tidak setuju sebanyak 7 orang (8,3%), sangat tidak setuju sebanyak 20 orang (23,8%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di kecamatan tebing sangat setuju bahwa kebijakan penentuan tindak lanjut terhadap observasi SPI (Satuan Pengawas Internal)

- 8) Jawaban responden mengenai, terdapat prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen pengelolaan keuangan, yang menjawab sangat setuju sebanyak 45 orang (53,6%), setuju sebanyak 32 orang (38,1%), tidak setuju sebanyak 3 orang (3,6%), sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (4,8%). Dari hasil yang diperoleh bahwa pegawai desa di kecamatan tebing sangat setuju bahwa prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen pengelolaan keuangan sangat penting dalam pengawasan interna;.

c. Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Tabel 4.6
Penilaian Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No Pernyataan	SS		S		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y.1	59	70.2	24	28.6	0	0.0	1	1.2	84	100
Y.2	54	64.3	27	32.1	2	2.4	1	1.2	84	100
Y.3	37	44.0	39	46.4	5	6.0	3	3.6	84	100
Y.4	35	41.7	43	51.2	4	4.8	2	2.4	84	100
Y.5	38	45.2	42	50.0	4	4.8	0	0.0	84	100
Y.6	42	50.0	35	41.7	2	2.4	5	6.0	84	100
Y.7	41	48.8	35	41.7	3	3.6	5	6.0	84	100
Y.8	42	50.0	33	39.3	7	8.3	2	2.4	84	100

Y.9	33	39.3	24	28.6	4	4.8	23	27.4	84	100
-----	----	------	----	------	---	-----	----	------	----	-----

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai, Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategi organisasi., yang menjawab sangat setuju sebanyak 59 orang (70,2%), setuju sebanyak 24 orang (28,6%), sangat tidak sebanyak 1 orang (1,2%)
- 2) Jawaban responden mengenai, Membuat perencanaan yang strategis, yang menjawab sangat setuju sebanyak 54 orang (64,3%), setuju sebanyak 27 orang (32,1%), tidak setuju sebanyak 2 orang (2,4%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.2%).
- 3) Jawaban responden mengenai, Mengembangkan berbagai indikator kinerja suatu program/kegiatan/proyek, yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 orang (44,0%), setuju sebanyak 39 orang (46,4%), tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0%), sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (3,6%).
- 4) Jawaban responden mengenai, Pimpinan selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil suatu program/kegiatan/proyek, yang menjawab sangat setuju sebanyak 35 orang (41,7%), setuju sebanyak 43 orang (51,2%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4,8%), sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2,4%).
- 5) Jawaban responden mengenai, Pimpinan dan staf mempertanggung jawabkan (accountable) hasil dari suatu program / kegiatan / proyek yang telah dilakukan. yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 orang (45,2%), setuju sebanyak 42 orang (50%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4,8%)

- 6) Jawaban responden mengenai, Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama - sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan., yang menjawab sangat setuju sebanyak 42 orang (50,0%), setuju sebanyak 35 orang (41,7%), tidak setuju sebanyak 2 orang (2,4%), sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0%).
- 7) Jawaban responden mengenai, Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya yang ada seperti dana, sumber daya manusia, dan waktu untuk digunakan dalam pengukuran kinerja., yang menjawab sangat setuju sebanyak 41 orang (48,8%), setuju sebanyak 35 orang (41,7%), tidak setuju sebanyak 3 orang (3,6%), sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (6,0%).
- 8) Jawaban responden mengenai, Menghubungkan antara pencapaian kinerja suatu program / kegiatan / proyek dengan tujuan strategis organisasi, yang menjawab sangat setuju sebanyak 42 orang (50,0%), setuju sebanyak 33 orang (39,3%), tidak setuju sebanyak 7 orang (8,3%), sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2,4%).
- 9) Jawaban responden mengenai, Penjelasan peran LAKIP dalam perencanaan dan ketepatan waktu penerbitannya., yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang (39,3%), setuju sebanyak 24 orang (28,6%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4,8%), sangat tidak setuju sebanyak 23 orang (27,4%).

4.1.11. Uji Kualitas Data

1) Hasil Uji Validitas Akuntansi Pemerintahan (X1)

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Akuntansi Pemerintahan (X1)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	45.66	31.130	.367	.881
X1.2	45.85	29.913	.499	.875
X1.3	45.80	28.894	.658	.867
X1.4	45.70	28.943	.620	.869
X1.5	45.67	28.374	.663	.866
X1.6	45.75	28.283	.652	.872
X1.7	45.72	29.920	.493	.877

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel 4.7 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Correction Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pernyataan pada variabel Akuntansi Pemerintahan dapat dikatakan valid (sah) karena nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

2) Hasil Uji Validitas Pengawasan Internal (X2)

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pengawasan Internal(X2)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	45.80	23.432	0.564	0.814
X2.2	45.81	22.952	0.635	0.809
X2.3	46.40	22.695	0.367	0.832
X2.4	45.93	23.306	0.562	0.809
X2.5	45.97	23.620	0.581	0.806
X2.6	45.73	21.375	0.681	0.788
X2.7	45.90	22.369	0.612	0.800
X2.8	46.10	22.921	0.571	0.807

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel 4.8 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Correction Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 8 (delapan) butir pernyataan pada variabel Pengawasan Internal dapat dikatakan valid (sah) karena nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

3) Hasil Uji Validitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	44.06	25.028	.397	.806
Y.2	44.00	25.183	.429	.804
Y.3	44.27	23.101	.692	.782
Y.4	44.27	22.950	.607	.787
Y.5	44.11	23.752	.588	.790
Y.6	44.67	21.402	.719	.874
Y.7	44.53	22.292	.661	.879
Y.8	44.60	21.041	.767	.861
Y.9	44.37	22.444	.585	.845

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel 4.9 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Correction Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 9 (sembilan) butir pernyataan pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah dapat dikatakan valid (sah) karena nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

4.1.12. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Akuntansi Pemerintahan (X1), Pengawasan Internal (X2) Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

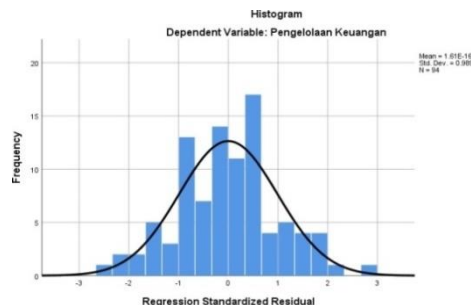
Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
X1	.879	Reliabel/Handal
X2	.818	Reliabel/Handal
Y	.794	Reliabel/Handal

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk semua variabel penelitian Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan hasil uji reliabilitas keseluruhan variabel handal (reliabel).

4.1.13. Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Histogram Uji Normalitas

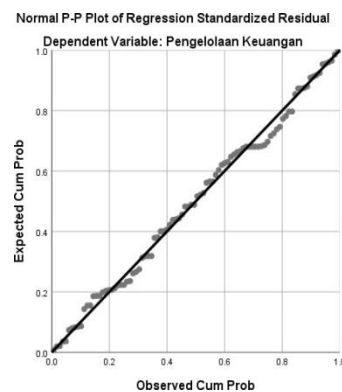


Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 uji grafik normal PP-Plot grafik histogram digunakan untuk melihat hasil uji normalitas. Gambar di atas sesuai dengan ketentuan uji normalitas yang menyatakan bahwa data dikatakan normal jika garis membentuk lonceng dan di tengah maka berdistribusi normal.

2) Hasil PP-Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Gambar 4.2 PP-Plot Uji Normalitas

Dari gambar 4.2 PP-Plot Uji Normalitas di atas grafik histogram menuju kecembungan seimbang tegah dan titik-titik PP-Plot berada di antara garis diagram maka data dinyatakan normal.

3) Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4.11
Hasil Uji Kormogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.24138803
Most		

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
Extreme Differences	Absolute	0.057
	Positive	0.057
	Negative	-0.045
Test Statistic		0.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,200 > 0,05$ nilai signifikansi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4.1.14. Hasil Uji Multikolienaritas

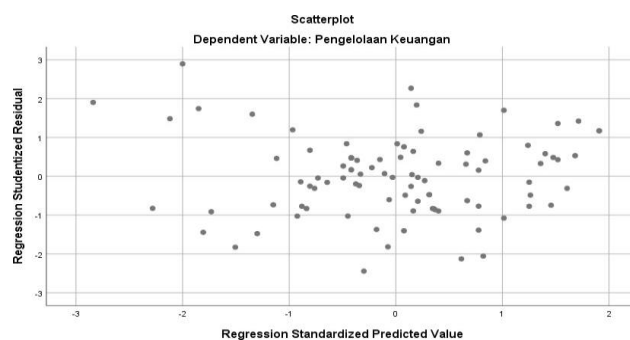
Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolienaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntansi Pemerintah	.353	2.832
	Pengawasan Internal	.353	2.832

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel 4.12 diketahui bahwa hasil uji multikolienaritas untuk variabel Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 maka penelitian ini dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.1.15. Hasil Uji Hetersokedasitas



Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Hetersokedasitas

Dari gambar 4.3 *Scatterplot* menunjukkan sebaran data tidak terlalu membentuk pola-pola tertentu dan tidak pula terlalu menyebar maka data dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.1.16. Hasil Regresi Linier Berganda

Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya Pengaruh Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja Instansi Pemerintah (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

β_2 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Akuntansi Pemerintahan (*Independent Variabel*)

X_2 = Pengawasan Internal (*Independent Variabel*)

e = *Error term*

Tabel 4.13
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	7.263	3.342
Akuntansi Pemerintahan	.317	.099
Pengawasan Internal	.500	.110

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Berdasarkan nilai koefisien yang terdibuat pada tabel di atas maka dapat dibuat rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,263 + 0,317 + 0,500 + e$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Konstanta $\alpha = 7,263$

Dari Konstanta $\alpha = 7,263$ dapat diketahui bahwa Akuntansi Pemerintahan tidak meningkat atau bernilai 0 (nol) maka Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 7,263.

b) $\beta_1 = 0,317$

Apabila Akuntansi Pemerintahan dinaikkan sebesar 100% maka akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0.317 atau 31,7 % dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

- a. Apabila Akuntansi Pemerintahan dinaikkan sebesar 100% maka akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0.317 atau 31,7% dengan asumsi variabel lain dan tidak mengalami perubahan
- b. Apabila Pengawasan Internal dinaikkan sebesar 100% maka akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0.500 atau 50,0 % dengan asumsi variabel lain dan tidak mengalami perubahan.

4.1.17. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial menunjukkan seberapa jauh variabel bebas Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Internal dan literasi keuangan terhadap variabel terikat

yaitu Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka dilakukan uji parsial (Uji t).

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.173	.032
	Akuntansi Pemerintahan	3.214	.003
	Pengawasan Internal	3.824	.000

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa angka-angka variabel bebas saling mempengaruhi variabel terikat.

Kriteria Pengambilan Keputusan :

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t > \alpha\ 5\%$.

Tolak H_0 (terima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha\ 5\%$.

1) Pengaruh Akuntansi Pemerintahan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai t_{hitung} Akuntansi Pemerintahan sebesar $3,214 > 1,98609$ ($n-k = 84 - 2 = 82$ pada 5%) dan signifikansi $0,002 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak, maka Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari berpengaruh positif adalah semakin baik atau semakin aktif Akuntansi Pemerintahan suatu instansi maka variabel dependennya juga cenderung meningkat sehingga perubahan dalam suatu instansi akan berpengaruh terhadap perubahan pada variabel yang sedang di teliti. Variabel yang di teliti pada penelitian ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai t_{hitung} Pengawasan Internal sebesar $3,854 > 1,98609$ ($n-k = 84 - 2 = 82$ pada 5%) dan signifikansi $0,002 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, maka Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari t positif, maka arah pengaruhnya juga positif yang artinya semakin tinggi Pengawasan Internal, maka nilai variabel dependen juga semakin meningkat dan perubahan pada Pengawasan Internal akan berdampak terhadap perubahan variabel dependen dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh dari Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada tingkat kepercayaan (*Confidence Interval*) atau level pengujian hipotesis 5%.

Tabel 4.15
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1651.195	2	825.598	76.889	.000
	Residual	977.113	84	10.738		
	Total	2628.309	86			
a. Dependent Variable: TOTAL_Y						
b. Predictors: (Constant),TOTAL_X2, TOTAL_X1						

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji F, diperoleh nilai F sebesar 76,889 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap variabel TOTAL_Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel dependen.

4.1.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dipakai untuk mengetahui seberapa besar ikatan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Hasil uji koefisien determinasinya adalah:

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 ^a	.628	.620	3.277
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1				
b. Dependent Variable: TOTAL_Y				

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 25

Dari tabel 4.16 dapat diketahui perolehan nilai *R Square* 0,628 dapat disebut koefisien determinasi, hal ini berarti 0,628 (62,8%) Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh dan dijelaskan oleh Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal sebesar 32,7% dijelaskan oleh variabel diluar model yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pembahasan mengenai pengaruh akuntansi pemerintahan terhadap kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah, termasuk di tingkat desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas instansi pemerintah .

Secara khusus, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan membantu instansi dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Selain itu, penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar dan memperhatikan klasifikasi anggaran mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan aparat pengawasan internal .

Namun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya ketertiban dalam penerapan sistem akuntansi dan ketidakmaksimalan pengawasan internal yang berimplikasi terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan dan kinerja administrasi pemerintahan desa .

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pengelolaan akuntansi pemerintahan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan

kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memperkuat good governance di tingkat pemerintahan desa.

2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pembahasan mengenai pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah, termasuk di lingkungan kantor kecamatan di Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai .

Pengawasan internal yang efektif dapat membantu dalam memastikan bahwa kegiatan dan proses yang dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, setiap potensi penyimpangan, ketidakwajaran, maupun kelemahan dalam pelaksanaan tugas dapat dideteksi dan diperbaiki secara dini, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi .

Selain itu, pengawasan internal berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan perangkat pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan secara objektif, menerapkan prinsip pemisahan tugas, serta dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten, mampu memperkuat pengendalian dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi .

Namun, tantangan yang masih dihadapi termasuk lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, dan keterbatasan sumber daya yang mampu mengurangi efektivitas pengawasan tersebut. Oleh karena itu, perlunya peningkatan kualitas pengawasan internal sebagai faktor penunjang utama peningkatan kinerja instansi pemerintah .

3. Pengaruh Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pembahasan mengenai pengaruh akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan saling mendukung dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan .

Pertama, penerapan akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan terpercaya. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi dasar utama bagi pengambilan keputusan manajerial, pengendalian anggaran, dan penilaian kinerja organisasi. Dengan demikian, penerapan akuntansi pemerintahan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan instansi pemerintah .

Kedua, pengawasan internal berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa proses dan kegiatan berlangsung sesuai rencana dan kebijakan, serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Pengawasan internal yang efektif akan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian, mendorong efisiensi operasional, dan memperkuat akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan .

Selain itu, pengaruh secara simultan dari penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal akan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kinerja instansi pemerintah. Kedua aspek saling melengkapi, di mana akuntansi pemerintahan menyediakan data yang akurat untuk pengawasan, dan

pengawasan internal menjamin bahwa data tersebut digunakan secara benar dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan organisasi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [Halim dan Kusufi \(2019\)](#) serta [Sujarweni \(2022\)](#), akuntansi pemerintahan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Sistem akuntansi yang akurat dan relevan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, serta mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran .

Sementara itu, pengawasan internal yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan dan proses pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Pengawasan internal yang kuat mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan serta kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional, sehingga meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara langsung .

Penelitian terdahulu oleh [Agoes \(2018\)](#) juga menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan secara independen dan sistematis mampu meningkatkan kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik yang didukung oleh pengelolaan keuangan yang transparan. Hal ini sekaligus memperkuat hubungan antara pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja .

Selain itu, studi yang dilakukan oleh [Rizki dan Rialdy \(2023\)](#) menekankan bahwa pengembangan perkiraan dan sistem akuntansi yang terus disesuaikan dengan lingkungan dan perubahan kebijakan sangat berpengaruh terhadap kemanfaatan data keuangan dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mereka juga menegaskan bahwa pengaruh positif dari akuntansi

pemerintahan dan pengawasan internal secara bersama-sama akan memperkuat citra tata kelola pemerintahan yang baik .

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, peneliti terdahulu sepakat bahwa penguatan sistem akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah didapatkan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pelaporan keuangan yang akurat dan lengkap dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja instansi, sehingga mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik di tingkat kecamatan.
2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Pengawasan internal yang efektif, termasuk adanya prosedur yang jelas, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta struktur organisasi yang transparan, dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian internal, sehingga mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih maksimal di tingkat kecamatan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan internal secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua variabel tersebut saling mendukung dan secara bersama-sama meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan operasional di tingkat kecamatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Instansi di tingkat kecamatan disarankan untuk lebih konsisten dan disiplin dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan guna memastikan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya.
2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi pengawasan berbasis teknologi untuk mempermudah proses monitoring dan pelaporan, serta meningkatkan akurasi dan transparansi.
3. Integrasi Sistem Akuntansi dan Pengawasan Perlu dilakukan integrasi yang erat antara sistem akuntansi pemerintahan dan mekanisme pengawasan internal, agar proses pengelolaan keuangan dan pengawasan berjalan secara bersinergi dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. (2019)., *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Bandung: Salemba Empat.

Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103-114.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

Dewi, E. P. (2018). *Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. Jurnal Lentera Bisnis, 7(2).

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, A & Nasir, A. (2019). *Implementasi Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Volume 10. No. 1, 760-766

Haryanto dan Sahmuddin serta Arifuddin (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Indra Bastian.(2019). *Akuntansi Sektor Publik*. In: *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka

Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Manullang, M dan Pakpahan, M. (2019). *Metodologi Penelitian*. Proses Penelitian Praktis. Bandung: Citapustaka Media..

Morissan, (2020). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.

Naufal, A, Zaki, dkk (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tintang: Perspektif Teori Keagenan*. JEKOBS. Vol.2(1). 23 – 37

Rialdy, N., Sari, M., & Nainggolan, EP (2020). Model pengukuran kualitas audit internal (Studi pada auditor internal pada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN di Kota Medan). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (2), 210-226.

Ristyowati,i R.i D., Oktafiah, Y., &i Rizqi, A. I. (2020).*Pengaruhi Pengawasani Dani Kedisiplinani Kerjai Terhadappi Kinerja Karyawan*.Jurnali EMA, 5(1),38–48. <https://doi.org/10.47335/ema.v5i1.47>

- Rizki, MS, & Rialdy, N. (2023). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah*. Jurnal Lentera Bisnis , 12 (2), 522-537.
- Rozi, F., Sari, M., & Astuti, W. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Internal Dan Key Performance Indicators (KPI) Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Bekerja Sebagai Variabel Moderating Di Perum Perumnas Regional I Medan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21(2), 270-280.
- Sari, E. N. (2016). *Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi: Kasus Pada Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara, Indonesia*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Sari, E. N., Lubis, A., & Astuty, W. (2020). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemnafaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang : Sistem Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Mutiara Akuntansi, 5(2), 107-126.
- Siregar, H. S. (2017). *Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.. KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, (8).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, W (2022) *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta.
- Suliyanto (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Tugas akhir, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sumarsono, S. (2018). *Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi Pertama*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Susanto, H., Sari, EN, & Sari, M. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Langkat*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 4 (4), 12264-12278.
- Zulia Hanum, S. E. (2009). *Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pengeluaran Kas* KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 8(2).

